

SISTEM KHILAFAH DALAM PANDANGAN HIZBUT TAHRIR
(Studi Kasus Kekhalifahan Bani Abbasiyah Dan Bani Umayyah II)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Humaniora (S. Hum)

Disusun Oleh:
SUWANTO
02121104

JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suwanto
NIM : 02121104
Jenjang/Jurusan : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2009

Saya yang menyatakan,



Suwanto
NIM: 02121104

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Adab
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

'Assalâmu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**SISTEM KHILAFAH DALAM PANDANGAN HIZBUT TAHRIR
(Studi Kasus Kekhalifahan Bani Abbasiyah Dan Bani Umayyah II)**

yang ditulis oleh:

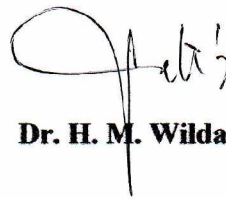
Nama : Suwanto
NIM : 02121104
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

Wassalâmu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2009

Dosen Pembimbing,



Dr. H. M. Wildan, MA.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fax. (0274) 513949

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DA/PP.00.9/1776/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : SISTEM KHILAFAH DALAM PANDANGAN HIZBUT TAHRIR
(Studi Kasus Kekhalifahan Bani Abbasiyah Dan Bani Ummayyah II)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUWANTO

NIM : 02121104


Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Agustus 2009

Nilai Munaqasyah : A-

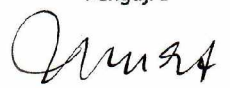
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

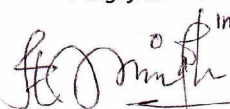
Ketua Sidang


Dr. H. Muhammad Wildan, M.A
NIP. 19710403 199603 1 001

Penguji I


Dr. Imam Muhsin, M. Ag
NIP. 197 30108 199803 1 010


Penguji II


Siti Maimunah, M. Hum
NIP. 19710430 199703 2 002



Yogyakarta, 03 Desember 2009

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Adab
DEKAN


Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M. Ag.
NIP. 19520921 198403 1 001

MOTTO

#

Belajarliah pada sejarah
Berpedomanlah pada al-Qurān dan Sunnah

PERSEMBAHAN

Untuk:

Almamaterku Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga;
Kedua orang tuaku; adik-adikku, dan sanak famili serta kerabatku,
Juga sahabat-sahabatku
dan siapa saja yang pernah aku kenal.

...

ABSTRAK

Khilafah hingga sekarang merupakan diskursus yang sering disalahpahami. Kesalahpahaman ini timbul karena pencampur adukan antara sejarah khilafah dengan sistemnya. Hal ini nampak dalam argumentasi para pencela sistem khilafah yang hanya memandang khilafah dengan memaparkan fakta buruknya sejarah para khalifah. Kian rancu ketika memahami sistem khilafah berdasarkan pada pandangan politik di luar Islam. Salah satu kelompok yang memiliki konsep khilafah yang detail adalah Hizbut Tahrir. Menurut Hizbut Tahrir, khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim yang menerapkan syari'at Islam bagi seluruh warganegara, dan menyebarkan Islam – dengan dakwah dan jihad– keseluruh penjuru dunia. Dalam pandangan Hizbut Tahrir, khilafah wajib satu adanya dalam satu masa, sehingga haram hukumnya bila ada dua khilafah apalagi lebih dari itu. Dalam sejarah khilafah pernah ada suatu masa di mana kekuasaan Abbasiyah dan kekuasaan Umayyah II yang semasa tegak. Penulis tertarik untuk mengkaji, bagaimana pandangan Hizbut Tahrir terhadap fakta tersebut.

Data dikumpulkan melalui sumber primer maupun sekunder. Sumber primer adalah buku-buku atau karya tulis yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir yang telah dinyatakan resmi sebagai pandangan Hizbut Tahrir. Sedangkan data sekunder berbagai media cetak yang berkaitan dengan pembahasan kajian ini ini. Kajian ini merupakan kajian sejarah dengan teori yang digunakan adalah teori politik Islam dengan pendekatan normatif.

Hasil penelitian ini adalah Hizbut Tahrir berpandangan bahwa sejarah khilafah dan sistem khilafah adalah dua hal yang berbeda. Sejarah khilafah adalah fakta penerapan sistem bukanlah sistem itu sendiri. Sehingga fakta sejarah kekuasaan Bani Abbasiyah dan kekuasaan Bani Umayyah II yang semasa tidak dapat dijadikan sebagai dalil bolehnya khilafah lebih dari satu. Sebab, bagi Hizbut Tahrir sumber hukum Islam secara tegas melarang hal tersebut.

Untuk itu penting bagi siapa saja, umumnya para intelektual dan khususnya ahli sejarah agar dapat memposisikan antara sejarah khilafah dengan sistemnya sesuai pada tempatnya. Hingga tidak menimbulkan kerancuan dalam membahas dan menilai sistem khilafah. Untuk membahas sistem khilafah dapat merujuk pada pandangan Hizbut Tahrir atau kelompok yang lainnya yang memang memiliki konsepnya ataupun menggantinya secara langsung pada sumbernya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsha	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dlad	dl	de dan el
ط	tha	th	te dan ha
ظ	dha	dh	de dan ha
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qaf
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
لا	lam alif	la	el dan a
ء	hamzah	`	apostrop
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...	fathah	a	a
...	kasrah	i	i
...	dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا...ي	fathah dan ya'	ai	a dan i
و...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

حسين : Hsain

حول : Haul

3. Maddah (panjang)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...	fathah dan alif	â	a dengan caping di atas
ي...	kasrah dan ya'	î	i dengan caping di atas
و...	dlammah dan wau	û	u dengan caping di atas

4. Ta' Marbuthah

- a. Ta marbuthah yang dimatikan atau berharakat sukun ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

فاطمة : Fâthimah

- b. Jika kata yang berakhir dengan ta' marbuthah dan diikuti oleh kata yang bersandang /al/, maka kedua kata ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

مكة المكرمة : Makkah al-Mukarramah

5. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bersyaddah.

Contoh:

ربنا : Rabbanâ

نزل : Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang “أل” dilambangkan dengan “al”, bila yang diikuti dengan huruf qamariyah. Sedangkan bila diikuti oleh huruf syamsiyah huruf kata sandang “أل” akan melebur dengan huruf yang setelahnya.

Contoh:

الحكمة : al-Hikmah

الشمس : asy-Syamsy

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya kepada Allah yang selalu memberi nikmat kepada makhluk-Nya. Terutama sekali, kenikmatan berupa petunjuk dalam kehidupan menuju keridlaan-Nya. Serta, berkat atas rahmat dan izin-Nya pula, penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah, Nabiyullah Muhammad saw., juga seluruh keluarga beliau dan para sahabat beliau serta orang-orang beriman yang selalu mengikuti jejak langkah beliau.

Skripsi yang berjudul “Sistem Khilafah dalam Pandangan Hizbut Tahrir: Studi Kasus Kepemimpinan Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah II” ini merupakan upaya penulis untuk memahami sistem Khilafah menurut Hizbut Tahrir, serta pandangan Hizbut Tahrir terhadap adanya dualisme kepemimpinan dalam sejarah Khilafah. Skripsi ini akhirnya dapat selesai juga tak lepas dari dukungan-dukungan dari berbagai pihak.

Dr. H. Muhammad Wildan, MA, sebagai pembimbing adalah orang yang pertama yang paling pantas mendapatkan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya. Di tengah-tengah kesibukannya yang padat, beliau rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada penulis. Oleh karena itu, tidak ada kata yang lebih indah untuk disampaikan kepada beliau selain ucapan terima kasih se dalam-dalamnya diiringi

doa semoga jerih payah dan pengorbanannya, baik moril maupun materiil, dibalas dengan berlipat kebaikan di sisi-Nya.

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag., Dekan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Dr. Maharsi, M.Hum., Ketua Jurusan SKI; Drs. Badrun Alaena, M.Si., Dosen Penasehat Akademik; dan seluruh Dosen di Jurusan SKI yang telah memberikan “pelita” kepada penulis di tengah luasnya samudra ilmu yang tidak bertepi.

Terima kasih pula kepada teman-teman mahasiswa, khususnya Jurusan SKI angkatan 2002; juga teman-teman Hizbut Tahrir yang telah membantu meminjamkan buku-buku yang dibutuhkan penulis; teman-teman di RISMATTA – BRENK (Remaja Islam Masjid Jami’ at-Taqwa Kota Baru – Brigade Remaja Anti Maksiat). Kebersamaan kita, saling mendukung dan saling membantu, serta senasib dan seperjuangan telah menjadi energi penyemangat dan pendorong bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam disertai rasa haru dan hormat penulis sampaikan secara khusus kepada kedua orang tua penulis. Merekalah yang membesarkan, mendidik dan selalu memberi perhatian yang besar kepada penulis sehingga penulis dapat mengerti arti kehidupan ini. Segala doa dan curahan kasih sayang yang mereka berikan, penulis dapat memahami bahwa itu semua adalah demi kebahagiaan penulis. *"Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".*

Atas bantuan dari berbagai pihak di atas itulah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Namun demikian, di atas pundak penulislah skripsi ini

dipertanggung jawabkan. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 15 Agustus 2009 M.



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAKSI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II	
SEJARAH KEKUASAAN DAULAH BANI ABBASIYAH DAN DAULAH BANI Umayyah II	18
A. Berdirinya Daulah Abbasiyah (Kekhalifahan Abul Abbas as-Saffah)	18
B. Berdirinya Daulah Umayyah II (Masa Amir Abdurrahman ad-Dakhil)	28
C. Penggunaan Gelar Khalifah Pada Masa Abdurrahman an-Nashir	33
 BAB III	
KONSEP KHILAFAH DALAM PANDANGAN HIZBUT TAHRIR	38
A. Definisi Khilafah	38
B. Hukum Khilafah	41
C. Bentuk dan Sistem Khilafah	45
D. Struktur Khilafah	50
1. Khalifah (Kepala Negara)	50
a. Syarat-Syarat Khalifah	50
b. Metode dan Prosedur Praktis Pengangkatan Khalifah.....	51
c. Masa kepemimpinan Khalifah dan Pemecatannya	53
2. <i>Mu'âwin Tafwîdl</i> (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan)	53

3.	<i>Mu'âwin Tanfîdz</i> (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi)	54
4.	<i>Walî</i> (Pimpinan Daerah/Gubernur)	54
5.	<i>Amîrul Jihâd</i> (Panglima Perang)	55
6.	Keamanan Dalam Negeri	56
7.	Urusan Luar Negeri	57
8.	Perindustrian	57
9.	Lembaga Peradilan (<i>Al-Qadlâ</i>)	57
10.	Struktur Administratif (Kemaslahatan Umum)	59
11.	<i>Baitul Mâl</i>	60
12.	Penerangan	61
13.	Majelis Umat (Lembaga Wakil Rakyat)	62
BAB IV	PANDANGAN HIZBUT TAHRIR TENTANG SEJARAH KEKUASAAN BANI ABBASIYAH DAN BANI Umayyah II	64
A.	Pandangan Hizbut Tahrir Tentang Sejarah Khilafah dan Sistem Khilafah	64
B.	Pandangan Hizbut Tahrir Terhadap Kekuasaan Bani Abbasiyah dan Kekuasaan Bani Umayyah II di Andalusia	70
C.	Pandangan Hizbut Tahrir Terhadap Dualisme Kepemimpinan Islam.....	76
BAB V	PENUTUP	84
A.	Kesimpulan	84
B.	Saran-saran	85
	DAFTAR PUSTAKA	87
	DAFTAR ISTILAH-ISTILAH PENTING	92
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 12 Agustus 2007, Hizbut Tahrir Indonesia mengadakan Konferensi Khilafah Internasional (KKI) di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, yang dihadiri lebih dari 100.000 massa simpatisannya. Tema yang diangkat pada KKI tersebut adalah “*Saatnya Khilafah Memimpin Dunia*”, yang tentu saja menggemparkan publik, baik nasional maupun internasional. Semenjak KKI itu, gagasan khilafah identik dengan Hizbut Tahrir.¹

Memang benar, bahwa tujuan Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyyuddin an-Nabhani pada tahun 1953 M di Al-Quds adalah sebagai wadah untuk memperjuangkan tegaknya kembali *Khilâfah Islamiyah* yang telah dibubarkan oleh Mushthafa Kemal pada tahun 1924 M di Turki. Hizbut Tahrir adalah suatu partai politik yang berideologi Islam, dengan tujuan berdirinya adalah untuk mengembalikan kehidupan Islam dengan menerapkan syariat Islam *kâffah* dalam bingkai negara khilafah, satu untuk seluruh kaum Muslim.²

Negara khilafah yang diwacanakan Hizbut Tahrir, sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru atau asing, sebab negara ini telah ada sejak Rasulullah saw. hijrah ke Yatsrib (Madinah) pada abad 7-an. Terminologi khilafah muncul setelah Rasulullah saw. wafat, yaitu tepatnya setelah Abu Bakar ra. dibai'at

¹ “Konferensi Khilafah Internasional 2007”, di <http://tv.detik.com>; “Konferensi Khilafah Internasional”, www.kabarindonesia.com; “Massa HTI Banjiri Jakarta”, www2.kompas.com; “Hizbut Tahrir Adakan Konferensi Khilafah Internasional”, www.antara.com (diakses pada 04/06/2009).

² Tim Hizbut Tahrir, “Mengenal Hizbut Tahrir”, *Booklet*, www.hizb-ut-tahrir.org, 2001, hlm. 3.

sebagai pengganti Rasulullah saw. dalam memimpin negara yang dikenal dengan *Khilâfah Rasûlullâh*.³ Setelah Abu Bakar ra., berturut-turut digantikan oleh tiga sahabat Nabi, Umar bin Khaththab ra., Utsman bin Affan ra. dan Ali bin Abi Thalib ra., yang dikenal dengan *Khulafâ ar-Rasyidîn*. Wilayahnya telah membentang dari Persia di sebelah Timur sampai ke Mesir di sebelah Barat,⁴ dalam satu kepemimpinan yang berpusat di Madinah (kecuali pada masa Ali ra. yang memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah⁵).

Setelah *Khulafâ ar-Rasyidîn*, kepemimpinan diganti oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan bin Harb, yang pusat pemerintahannya dipindah ke Damaskus. Semenjak Mu'awiyah, suksesi kepemimpinan berubah dari yang dipilih umat menjadi turun-temurun yang dikenal dengan Khilafah Umayyah.

Pada masa Mu'awiyah, perluasan wilayah kekuasaan Islam di Timur sudah mencapai Hindustan dan Lahore (India), dan ke arah Barat, mengepung Konstantinopel, dan sampai ke Afrika Utara (Tunisia dan Kartago). Pada masa Khalifah Bani Umayyah ke-6, Walîd bin Abdul Malik, pembebasan Islam ke Timur telah mencapai Nepal dan tanah Turkistan serta memasuki daerah Tiongkok. Sedangkan ke arah Barat sudah mencapai Maroko di Laut Atlantik dan menyeberang ke Andalusia (Spanyol) –yang kala itu dikenal dengan

³ Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 46; lihat pula, Fuad Mohd. Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), hlm. 61-64.

⁴ *Ibid*, *Islam...*, hlm. 67.

⁵ Philip K. Hitti, *History of the Arab*, terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 224.

Semenanjung Iberia. Kemudian, penaklukannya disempurnakan pada masa Hisyam bin Abdul Malik.⁶

Sebagaimana yang telah penulis paparkan sekilas bahwa suksesi kepemimpinan setelah *Khulafâ ar-Rasyidîn* adalah turun-temurun, hingga menyebabkan adanya gerakan-gerakan penentangan yang lebih menonjolkan kekabilahan yang hendak mengambil alih kekuasaan. Kabilah yang paling menonjol dan terorganisir gerakan bawah tanahnya adalah Bani Abbas, yang berpuncak pada runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah dan berdirinya Bani Abbasyiah. Di bawah komando Abul Abbas as-Saffah (132 - 136 H/750 - 754 M), khalifah pertama Khilafah Abbasiyah, seluruh keturunan Bani Umayyah diburu untuk dibunuh.

Abdurrahman bin Mu'awiyah berhasil menyelamatkan diri dari incaran pasukan Bani Abbasiyah dengan bersembunyi dan menyamar bersama pembantu setianya Badr. Lima tahun kemudian (755 M), setelah melalui perjalanan yang begitu sulit, Abdurrahman ad-Dakhil sampai ke Andalusia. Di Andalusia, Abdurrahman mampu mempengaruhi berbagai suku untuk memberikan kekuasaan kepadanya, hingga pada tahun 756 M, ia berhasil membangun kekuasaan Bani Umayyah yang baru.

Setelah negerinya mulai aman, Abdurrahman mulai membangun Andalusia dalam berbagai sarana kemajuan dan juga kemakmuran menyamai

⁶ Fadil SJ., *Pasang Surut Peradaban Islam dalam Lintas Sejarah* (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), hlm. 124-125.

Khilafah Abbasiyah di Timur dan sebagai kiblat pengetahuan untuk wilayah Eropa.⁷

Pada masa Abdurrahman ad-Dakhil (756 - 788 M), walau telah mencapai kemajuan dan menciptakan ketentraman, menyamai Khilafah Abbasiyah, namun ia tidak memproklamirkan diri sebagai khalifah, melainkan cukup dengan gelar *amîr* (gubernur). Abdurrahman ad-Dakhil menganggap bahwa gelar khalifah cukup satu, yakni yang ada di Timur tersebut, walau secara administratif seluruh Andalusia independen. Setelah Abdurrahman ad-Dakhil mangkat, gelar *amîr* masih tetap dipertahankan. Akan tetapi pada masa Abdurrahman an-Nashir (300 – 350 H /912 - 961 M), yakni mulai pada tahun 929 M, ia baru memproklamirkan gelar khalifah bagi dirinya. Sedangkan pada waktu yang sama, di Timur, Khilafah Abbasiyah masih berdiri. Dengan demikian, telah terjadi lebih dari satu penyandang gelar khalifah dalam masa yang bersamaan di wilayah kaum Muslim.

Hizbut Tahrir berpandangan bahwa khalifah wajib satu untuk seluruh kaum Muslim; haram hukumnya bila ada dua khalifah⁸ –apalagi lebih dari itu. Akan tetapi dalam fakta sejarahnya, ternyata pada masa kepemimpinan Bani Abbasiyah, Abdurrahman ad-Dakhil berhasil menegakkan ke-*amîr*-an yang independen, hingga masa Abdurrahman an-Nashir, gelar khalifah digunakan semenjak ia memproklamirkan diri sebagai khalifah pada tahun 929 M, setelah sebelumnya ia menyandang gelar *amîr*. Kepentingan penulis adalah

⁷ Budi Handriyanto “The Falcon of Andalus: ‘Abd ar-Rahman Pendiri Kekhalifahan di Andalusia”, dalam Majalah *Islamia*, Vol. V No. 1, 2009, hlm. 106-107 dan 110-112.

⁸ Yahya Abdurrahman “Keharaman Mengangkat Dua Khalifah”, dalam Majalah *al-Wa’ie* No. 62 Tahun VI, 1-31 Oktober 2005, hlm. 58.

menguraikan sikap dan penjelasan Hizbut Tahrir tentang fenomena dualisme kepemimpinan tersebut.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Skripsi ini membatasi pembahasannya pada Pandangan Hizbut Tahrir terhadap sistem khilafah dan sejarah kekhilafahan terutama pada fakta sejarah adanya Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah II dalam satu masa. Adapun dalam pembahasan sistem khilafah, dalam sub struktur khilafah akan difokuskan pada pembahasan khalifah dan struktur yang lain merupakan tambahan atau pelengkap. Pembatasan pada tahun 98 H yaitu diangkatnya Muhammad bin Abdullah sebagai pemimpin pertama gerakan Bani Abbasiyah. Hingga tahun 316 H/929 M yaitu masa Abdurrahman an-Nashir ketika telah memproklamirkan diri sebagai khalifah di Andalusia. Pada pembahasan sejarah ini lebih difokuskan pada pemimpin pemerintahan yang pertama saja, yaitu Khalifah Abul Abbas as-Saffah (Bani Abbasiyah), Amir Abdurrahman ad-Dakhil (Bani Umayyah II), dan Amir/Khalifah Abdurrahman an-Nashir (Bani Umayyah II).

Batasan ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan Hizbut Tahrir tentang sejarah khilafah dan sistem khilafah?
2. Bagaimana pandangan Hizbut Tahrir tentang kekuasaan Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah?

3. Bagaimana pandangan Hizbut Tahrir tentang dualisme kepemimpinan dalam Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hizbut Tahrir tentang satu kepemimpinan untuk seluruh kaum Muslim dalam satu masa dan kaitannya dengan sejarah Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah II yang semasa. Kegunaan dari penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat membangun kesadaran akan situasi kontemporer, terutama tentang adanya suatu gerakan penegakan kembali negara khilafah satu untuk seluruh kaum Muslim yang menerapkan syariat Islam secara *kâffah*. Juga untuk memperluas wawasan bagi siapa saja yang ingin memahami sistem khilafah dan sejarahnya serta gerakan Hizbut Tahrir yang memperjuangkannya. Secara praktis, dapat dijadikan pilihan solusi dan bahan evaluasi bagi umat Islam dalam memilih dan memperjuangkan konsep kesatuan kepemimpinan bagi seluruh kaum Muslim dalam sistem ke-tatanegara-an Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang sejarah Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah II dalam pandangan Hizbut Tahrir, sejauh ini, belum penulis temukan. Adapun buku, artikel, dan skripsi yang membahas tentang Hizbut Tahrir, Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah sudah cukup banyak. Adapun yang akan penulis bahas beberapa saja.

Dua buku karya Dr. Yusuf al-Isy dengan judul dalam edisi Indonesia, *Dinasti Umawiyah*, penerjemah Iman Nurhidayat, Lc. dan Muhammad Khalil, Lc. dan *Dinasti Abbasiyah*, penerjemah Arif Munandar, Lc. Keduanya diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar Tahun 2007. Buku pertama menguraikan tentang fitnah besar yang menimpa kaum Muslim dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan hingga berakhirnya masa Daulah Umawiyah. Sedangkan buku kedua, menguraikan tentang awal gerakan revolusi Abbasiyah dan propagandanya yang berhasil merebut kekuasaan dengan mendirikan Khilafah Abbasiyah hingga terpecahnya negeri-negeri kaum Muslim menjadi beberapa kekuasaan serta beberapa karya agung pada masa-masa tersebut. Kedua buku ini tidak membahas tentang kekuasaan Bani Umayyah II di Andalusia. Kedua buku ini mencoba untuk mengungkap lebih mendalam kecenderungan, kejiwaan, karakter dan moral kelompok-kelompok maupun individu-individu pelaku sejarah.

Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, Penerjemah: Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi, 2008), menguraikan tentang Arab pra-Islam hingga akhir kekuasaan Utsmani dan masa Arab modern dengan terbentuknya negara Bangsa. Buku lain adalah karya Ahmad Thomson dan Muhammad 'Ata' Ur Rahim, *Islam Andalusia: Sejarah Kebangkitan dan Keruntuhan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), yang menyuguhkan uraian tentang Andalusia sebelum Islam hingga musnahnya kekuasaan Islam di Spanyol. Buku ini lebih menekankan pada kondisi Andalusia, terutama ketika

Islam menjadi sistem hidup. Namun buku ini tidak membahas secara detail tentang sistem pemerintahan dan politik pada masa-masa tersebut.

Skripsi Ellyawati, *Khilafah Islam dalam Pandangan Hizbut Tahrir*, Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin (2003), menyuguhkan tentang sejarah berdirinya Hizbut Tahrir dan masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia, serta sejarah perjuangan politik umat Islam Indonesia. Skripsi ini mengungkap hubungan negara dengan Islam dan sistem pemerintahan Islam. Diuraikan pula tentang wajibnya kaum Muslim memiliki satu kepemimpinan namun, tidak memuat tentang kajian sejarah kekhalifahan secara khusus.

E. Kerangka Teori

Pada dasarnya penelitian ini mencoba mendeskripsikan dan menganalisis perpolitikan Islam pada masa lampau (sejarah). Berkaitan pula dengan pola perilaku tiap-tiap individu maupun kelompok (terutama penguasa Muslim), berupa keinginan berkuasa, membentuk partai⁹, mengoreksi penguasa hingga pertikaian politik dan sesekali terjadi perang saudara atau pemberontakan.

Islam itu sendiri selain mencakup urusan spiritual juga mencakup urusan politik, dengan kata lain tidak ada pemisahan agama dengan politik dalam Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Taimiyyah:

“Teori Islam tentang kenegaraan mempunyai cirinya sendiri yang berbeda dengan konstitusi politik lain. Kekhususan tersebut berakar

⁹ Partai yang dimaksud di sini bermakna umum yang pengertiannya sama dengan kelompok, golongan, gerakan dan yang sejenisnya.

*pada hakekat teologi dan hukum Islam yang mengatakan bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan, namun saling berkaitan.”*¹⁰

Imam al-Ghazali, menegaskan:

*“...bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Bahwa agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjanganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang-lenyap.”*¹¹

Para khalifah hanya menerapkan aturan Islam dan sebagian dari mereka ada yang berbuat jahat telah melakukan penyimpangan sebagai pribadi (oknum). Meskipun demikian, tidak ada seorang pun dari mereka yang berani menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.¹²

Politik menurut Hizbut Tahrir adalah pemikiran-pemikiran yang terkait dengan pengurusan kepentingan masyarakat. Pemikiran-pemikiran yang dimaksud baik berupa akidah maupun hukum-hukum juga aktivitas yang telah sedang dan akan berlangsung.¹³ Adapun politik Islam adalah hukum atau pandangan yang berkaitan dengan cara bagaimana mengelola dan mengatur urusan masyarakat dengan hukum Islam. Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab *Mafâhim Siyâsah*, halaman 1 mendefinisikan politik (*as-siyâsah*) sebagai “Pemeliharaan urusan rakyat baik dalam negeri maupun luar negeri”.¹⁴ Pemeliharaan urusan di dalam negeri dilakukan dengan cara menerapkan ideologi (*mabda'*) Islam, yaitu dengan adanya khilafah yang menerapkan

¹⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 9.

¹¹ Dalam bukunya, “al-Iqtishâd fi al-I’tiqâd”, halaman 199, dikutip dari, Abu ‘Abdul Fattah ‘Ali Belhaj, *Menegakkan Kembali Negara Khilafah: Kewajiban Terbesar dalam Islam*, terj. M Shiddiq al-Jawi (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001), hlm. 69.

¹² Pendapat Syaikh Muhammad al-Ghazali dalam bukunya, “Ma’rakah al-Mushhaf”, halaman 57, dikutip dari, ‘Ali Belhaj...*Ibid*, hlm. 55-56.

¹³ Anonim, *Islam, Dakwah dan Politik* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 20.

¹⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*, terj. M. Shiddiq al-Jawi (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2006), hlm. 7.

hukum Islam. Sedangkan pemeliharaan urusan umat di luar negeri dilakukan dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Dengan demikian, Muslim yang berkecimpung dalam politik berarti Muslim tersebut harus mengatur, memperbaiki dan mengurus urusan masyarakat dengan hukum-hukum Islam, dan memberi petunjuk Islam kepada masyarakat.¹⁵

Dalam perspektif Islam, negara adalah pelaku langsung dari pemeliharaan urusan rakyat. Sedangkan partisipasi rakyat dalam bidang politik adalah dengan melakukan kontrol terhadap kebijakan penguasa, apakah sesuai ataukah tidak dengan hukum Islam. Dengan demikian, tugas rakyat dalam bidang politik baik sebagai individu maupun kelompok adalah melakukan koreksi dan nasehat terhadap pemerintah.

Istilah khilafah sendiri baru digunakan pasca mangkatnya Rasulullah saw., yaitu, setelah dibai'atnya Abu Bakar ra. sebagai kepala negara bagi seluruh kaum Muslim.¹⁶ Pada masa tersebut –abad ke-1 H/ke-7 M– belum dikenal istilah negara (*state*), namun, aktivitas yang menunjukkan hal tersebut telah ada yaitu dengan adanya khilafah itu sendiri. Tidak dapat dipastikan kapan awal mula kata *daulah* digunakan untuk menyebut negara, tapi mungkin mulai dikenalkan ketika terjadi penterjemahan buku-buku filsafat pada masa Bani Abbasiyah. Bila pada awal Islam untuk menyebut negara dalam Islam cukup dengan istilah khilafah saja, kemudian belakangan dikenallah istilah *Daulah Islamiyah* (negara Islam) atau *Daulah Khilâfah* (negara Khilafah). Bukti yang lebih pasti berkenaan dengan penggunaan

¹⁵ “Politik bagian dari Islam”, Bulletin Jum’at *Al-Islam*, edisi 52.

¹⁶ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 78.

istilah *daulah* dalam pengetahuan negara dapat ditemukan dalam kitab *Muqaddimah Ibn Khaldûn* yang ditulis pada tahun 779 H atau sekitar pertengahan abad ke-8 H. dalam karyanya tersebut, Ibn Khaldun membedakan antara *ad-Daulah* (negara), *al-Mulk* (kerajaan), dengan *al-Khilâfah wa al-Imâmah*.¹⁷

Ibn Khaldun berpendapat bentuk pemerintahan ada 3:

1. Pemerintahan yang natural (*siyasah thâbi'iyah*), yaitu pemerintahan yang membawa masyarakatnya sesuai dengan tujuan nafsu. Artinya, seorang raja dalam memerintah kerajaan (*mulk*) lebih mengikuti kehendak dan hawa nafsunya sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat yang akibatnya rakyat sukar mentaati akibat timbulnya teror, penindasan, dan anarki. Pemerintahan jenis ini di zaman sekarang menyerupai pemerintahan otoriter, individualis, otokrasi, atau inkonstitusional.
2. Pemerintahan yang berdasarkan nalar (*siyasah 'aqliyah*), yaitu pemerintahan yang membawa rakyatnya sesuai dengan rasio dalam mencapai kemaslahatan duniawi dan mencegah kemudlaratan. Pemerintahan yang berasaskan undang-undang yang dibuat oleh para cendekiawan dan orang pandai. Bentuk pemerintahan seperti ini dipuji di satu sisi tetapi dicela di lain sisi. Pemerintahan jenis ini di zaman sekarang serupa dengan pemerintahan republik, atau kerajaan insitusional yang dapat mewujudkan keadilan sampai batas tertentu.

¹⁷ Tim Penulis Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syari'at Islam* (Hizbut Tahrir Indonesia, 2002), hlm. 124-125.

3. Pemerintahan yang berlandaskan agama (*siyasah diniyyah*), yaitu pemerintahan yang membawa semua rakyatnya sesuai dengan tuntunan agama, baik yang bersifat keduniawian maupun keukhrawian. Menurut Ibn Khaldun model pemerintahan seperti inilah yang terbaik, karena dengan hukum yang bersumber dari ajaran agama akan terjamin tidak saja keamanan dan kesejahteraan di dunia tetapi juga di akhirat. Karena yang dipakai sebagai asas kebijaksanaan pemerintahan itu adalah ajaran agama, khususnya Islam, maka kepala negara disebut khalifah dan imam. Khalifah, oleh karena ia adalah pengganti Nabi dalam memelihara kelestarian agama (Islam) dan kesejahteraan duniawi rakyatnya. Imam, karena sebagai pemimpin, ia ibarat imam shalat yang harus diikuti oleh rakyatnya sebagai makmum.¹⁸

Jadi, Islam memiliki ajaran tentang negara tersendiri yang khas, yang tidak mengenal pemisahan antara agama dengan negara. Bahkan negara adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, negara tersebut telah dipraktekkan dalam kehidupan. Negara Islam memiliki wilayah yang terus bertambah seiring dengan perkembangan dakwah Islam. Umat Islam memiliki ajaran persaudaraan (*ukhuwah*) tanpa membedakan suku, ras, bentuk fisik, dan batas-batas teritorial. Sedangkan non-Muslim yang menjadi warganegara mendapatkan

¹⁸ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 232-233.

perlakuan yang sama di mata hukum dan mereka bebas beribadah sesuai dengan keyakinannya.

Dalam teori '*ashabiyah*-nya Ibn Khaldun berpandangan bahwa '*ashabiyah* merupakan watak manusia yang bentuknya bisa bermacam-macam, yaitu:

1. Ikatan darah atau persamaan ke-Tuhan-an (ikatan aqidah)
2. Tempat tinggal berdekatan atau bertetangga
3. Persekutuan atau aliansi, dan
4. Hubungan antara pelindung dan yang dilindungi.

Khusus bangsa Arab menurut Ibn Khaldun, persamaan seagamalah (ikatan aqidah) yang membuat mereka berhasil mendirikan kekuasaan (negara). Sebab menurutnya, bangsa Arab adalah bangsa yang paling tidak mau tunduk satu sama lain, kasar, angkuh, ambisius dan masing-masing ingin menjadi pemimpin. '*Ashabiyah* yang ada hanya '*ashabiyah* kesukuan/*qabilah* yang tidak memungkinkan mendirikan sebuah kekuasaan (negara) karena sifat mereka. Hanya karena agama yang dibawa oleh Nabi mereka akhirnya bisa dipersatukan dan dikendalikan.¹⁹

Pemegang kekuasaan menurut Ibn Khaldun adalah kelompok yang lebih kuat solidaritas sosialnya dan lebih bersatu dalam tujuannya. Yakni, suku yang wibawanya lebih tinggi dan yang lebih dominan sedangkan kesatuan tujuan dapat diraih dengan kesatuan agama. Namun, apabila semangat agama mulai melemah dan rusak, sehingga agama tidak lagi memainkan peranan penting,

¹⁹ *Ibid*, hlm. 182.

maka kekuasaan akan pindah kepada golongan yang lebih bersatu.²⁰ Seperti digambarkan bahwa kemewahan dan tindakan sewenang-wenang penguasa dapat berpengaruh pada melemahnya kedaulatan penguasa, bahkan meruntuhkannya.

Senada dengan pandangan tersebut, Taqiyuddin an-Nabhani, dalam kitabnya *Peraturan Hidup dalam Islam* menulis bahwa manusia berkelompok atau bersatu dengan berbagai ikatan, yaitu:

1. Ikatan kebangsaan maupun ikatan kesukuan
2. Ikatan kemaslahatan/kepentingan maupun ikatan kerohanian
3. Ikatan *aqidah aqliyah*²¹ yang melahirkan peraturan hidup yang menyeluruh (Ikatan *mabda'*/ideologis).

Ikatan ideologi²²-lah yang mampu menyatukan manusia yang plural dalam satu kesatuan. Sedangkan ikatan kebangsaan maupun kesukuan terbatas pada suku-bangsa tertentu –dalam rangka merespon ancaman dari luar–. Adapun ikatan kepentingan terbatas pada kepentingan yang ingin dicapai, sedangkan ikatan kerohanian terbatas pada spiritualitas semata. Dengan Islamlah –sebagai agama sekaligus ideologi– kaum Muslim dapat bersatu walau terdapat berbagai suku-bangsa, bentuk fisik dan teritorial yang berbeda-

²⁰ *Ibid*, hlm. 192.

²¹ “*Aqidah aqliyah* adalah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan hidup; serta tentang apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan, di samping hubungannya dengan sebelum dan sesudah alam kehidupan.” Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, terj. Abu Amin dkk (Bogor: Pustaka Thariqul ‘Izzah, 2001), hlm. 36.

²² Ideologi (*Mabda'*) adalah pemikiran yang mendasar (worldview; *aqidah aqliyah*) yang melahirkan peraturan-peraturan (sistem; *nidham*) yang dapat memecahkan problematika kehidupan. Islam merupakan akidah rasional sekaligus peraturan-peraturan kehidupan yang terlahir dari akidah Islam. Lihat, Muhammad Ismail, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, terj. Nurkhalis (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm. 181.

beda. Sehingga, apabila dalam tubuh kaum Muslim lebih dominan ikatan selain ikatan ideologis (Islam) niscaya akan terpecah-belah.

F. Metode Penelitian

Pembahasan ini bersifat *study histories*, maka metode yang digunakan adalah metode sejarah yaitu suatu proses untuk menguji dan menganalisa secara kritis terhadap rekaman sejarah dan peninggalan masa lalu yang kemudian direkonstruksi secara imajinatif dengan menempuh proses *heuristik*, *verifikasi*, *interpretasi* dan *historiografi*.²³

1. *Heuristik* yaitu pengumpulan sumber-sumber baik yang berupa bahan-bahan tertulis maupun lisan yang relevan. Pada langkah awal ini berbagai buku, Majalah/majalah maupun media-media tulis lainnya –semisal *web site*–, yang terkait dengan pokok bahasan penulis kumpulkan, bisa diperoleh dari milik pribadi maupun meminjam terutama di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. *Verifikasi* atau *kritik* yaitu data-data yang telah terkumpul selanjutnya akan ditelaah dan diuji keasliannya dan kesahihannya, yaitu melalui kritik intern dan kritik ekstern.²⁴ Langkah ini dilakukan dengan memilih dan memilah data-data yang telah terkumpul dengan membandingkan data satu dengan yang lain untuk mendapatkan jejak

²³ Louis Gotshlak, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 32.

²⁴ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 44.

sejarah yang benar-benar diperlukan dan relevan dengan objek penelitian.

3. *Interpretasi* yaitu menyimpulkan data-data yang dapat dipercaya berdasarkan bahan-bahan yang otentik. Pada langkah ini penulis melakukan pembacaan berulang-ulang terhadap data-data yang telah dipilih terutama segala hal yang berkaitan dengan pendapat Hizbut Tahrir tentang dua kepemimpinan Islam dan fakta-fakta sejarah Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah II.
4. *Historiografi* yaitu penyusunan kesaksian yang dapat dipercayai itu menjadi suatu kisah. Tahap akhir ini penulis menuliskan hasil pembacaan dan pemahaman penulis dalam bentuk penjabaran pendapat Hizbut Tahrir tentang dua kepemimpinan Islam dan fakta-fakta sejarah Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah II.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II dimulai dengan gerakan Bani Abbasiyah, dan berdirinya Daulah Abbasiyah. Juga membahas tentang berdirinya Daulah Umayyah II di Andalusia dan dilanjutkan dengan pembahasan masa Abdurrahman an-Nashir di Andalusia. Pembahasan-pembahasan ini hanya dibatasi pada seputar awal

kepemimpinan Abul Abbas as-Saffah, Abdurrahman ad-Dakhil dan Abdurrahman an-Nashir. Tujuan bab ini adalah untuk mendapatkan gambaran fakta sejarah tentang adanya dua kepemimpinan kaum Muslim, Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah II.

Bab III berisi uraian tentang konsep khilafah dalam pandangan Hizbut Tahrir. Dalam strukturnya lebih di fokuskan pada bahasan tentang khalifah saja sedangkan struktur yang lainnya sebagai tambahan atau pelengkap pembahasan. Bab ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang Pemerintahan Islam dalam pandangan Hizbut Tahrir.

Bab IV mengulas tentang pandangan Hizbut Tahrir tentang sejarah dan sistem khilafah. Di sini mengulas tentang bagaimana seharusnya memposisikan antara sejarah khilafah dengan sistem khilafah. Dilanjutkan dengan pandangan Hizbut Tahrir terhadap Daulah Abbasiyah. Kemudian membahas tentang Bani Umayyah II dalam pandangan Hizbut Tahrir. Serta, mengulas tentang kesatuan kepemimpinan dalam Islam dan haramnya mengangkat dua khalifah dalam pandangan Hizbut Tahrir. Bab ini bertujuan mengungkap pandangan Hizbut Tahrir tentang dua kepemimpinan dalam Islam.

Bab V penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang muncul dari penelitian ini. Saran-saran berisi hal-hal yang dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah:

Sistem khilafah dalam pandangan Hizbut Tahrir adalah sistem yang berlandaskan pada wahyu. Sedangkan pelaksanaannya adalah manusia yang tentu mungkin untuk berbuat salah. Untuk itu, Islam sendiri telah menetapkan langkah-langkah praktis untuk mencegah dan mengatasi perbuatan salah tersebut.

Sedangkan sejarah khilafah, menurut Hizbut Tahrir adalah kisah-kisah pelaksanaan sistem khilafah pada masa yang telah lampau. Sejarah secara umum, baik sejarah Islam maupun bukan, mencakup kisah sukses juga kisah tentang kegagalan. Sejarah dapat digunakan untuk mengambil pelajaran bagaimana sistem khilafah dilaksanakan sesuai aturan-aturan-Nya dan apa akibat bila melanggar aturan-aturan-Nya.

Bagi Hizbut Tahrir, sejarah bukanlah sumber hukum bagi sistem khilafah, kecuali Sirah Nabi saw. dan Sirah Sahabat r.a. Sehingga, adanya sejarah Bani Abbasiyah yang merebut kekuasaan dengan memerangi Khalifah Bani Umayyah, bukan dalil untuk bolehnya mengambil kekuasaan dengan jalan kekerasan. Begitu pula dengan sejarah dualisme kekuasaan dalam Islam pada masa Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah II, bukanlah dalil untuk bolehnya kaum Muslim memiliki lebih dari satu negara. Sejarah tersebut tak

lebih hanyalah bentuk penyimpangan dari sistem khilafah oleh oknum Muslim tertentu pada masa tersebut.

B. Saran-saran

Kajian sejarah merupakan kajian tentang fakta-fakta pada masa lampau, maka ia membutuhkan informasi-informasi sebagai sumber. Boleh jadi, sumber-sumber yang digunakan oleh penulis masih belum lengkap untuk menyusun runtutan fakta peristiwa-peristiwa sejarah atau mungkin memuat kesalahan. Sehingga, menjadikan skripsi ini masih belum final dan dapat dilakukan kajian lanjutan untuk mencapai hasil penelitian yang lebih sempurna. Bahkan, bisa jadi mendapatkan kesimpulan yang berbeda, bila ternyata ada data-data yang keliru atau karena ditemukannya argumentasi-argumentasi yang baru.

Skripsi ini lebih terfokus pada kajian khalifah dalam struktur khilafah yang merupakan pandangan Hizbut Tahrir. Kemudian digunakan untuk meneropong sejarah kasus dualisme kekuasaan antara Bani Abbasiyah dengan Bani Umayyah II. Sehingga tidak begitu banyak membahas tentang struktur yang lainnya. Sedangkan, argumentasi Hizbut Tahrir yang dirujuk di sini tidak dimuat keseluruhan dalilnya. Maka, menjadi peluang bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengungkapkan secara detail.

Adapun berkaitan dengan memposisikan antara sejarah khilafah dan sistem khilafah adalah sesuatu hal yang sangat perlu. Agar para peneliti sejarah maupun kaum intelektual tidak terjebak dalam perbuatan

mengeneralisir sistem khilafah berdasarkan pada peristiwa tertentu dalam sejarah khilafah atau menyimpulkan sistem khilafah berdasarkan pada sejarahnya. Untuk pembahasan sistem khilafah bisa merujuk pendapat Hizbut Tahrir maupun kelompok-kelompok serta ulama'-ulama' Islam lainnya atau menggantinya langsung dari sumber-sumber hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurʾān

Departemen Agama RI, *al-Qurʾān dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005.

Buku

Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Abdurrahman, Hafidz, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, Bogor: Al-Azhar Press, 2007.

ʿAfifi, ʿAbdul Hakim, *1000 Peristiwa dalam Islam*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.

Anonim, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Nurkhalish, Bogor: Pustaka Thariqul ʿIzzah, 2001.

-----, *Islam, Dakwah dan Politik*, Bogor: Pustaka Thariqul ʿIzzah, 2002.

Belhaj, Abu ʿAbdul Fattah ʿAli, *Menegakkan Kembali Negara Khilafah: Kewajiban Terbesar dalam Islam*, terj. M Shiddiq al-Jawi, Bogor: Pustaka Thariqul ʿIzzah, 2001.

Fachruddin, Fuad Mohd., *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988.

Fadil SJ., *Pasang Surut Peradaban Islam dalam Lintas Sejarah*, Malang: UIN-Malang Pres, 2008.

Gotshlak, Louis, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI-Press, 1985.

Hasan, Hasan Ibrahim, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.

Hitti, Philip K., *History of the Arab*, terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi, 2008.

Ismail, Muhammad, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, terj. Nurkhalis, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.

- Isy, Yusuf, *Dinasti Umawiyah*, terj. Iman Nurhidayat, Lc. dan Muhammad Khalil, Lc., Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007.
- , *Dinasti Abbasiyah*, terj. Arif Munandar, Lc., Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyyah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Karim, M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009.
- Katsir, Ibnu, *Mukhtashar Al Bidayah wa An Nihayah*, terj. Asmuni, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Khaldun, Ibn, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Khalidi, Mahmud, *Bai'at dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam*, terj. Muhammad Bajuri, Bangil: Al-Izzah, 2002.
- Khalil, 'Atha bin, *Ushul Fiqh*, terj. Ust. Yasin as-Siba'i, Bogor: Pustaka Thariqul 'Izzah, 2003.
- Mahmudunnasir, Syed, *Islam: Konsepsi dan Sejarah*, terj. Andang Affandi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Mufrodi, Ali, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Nabhani, Taqiyuddin, *Peraturan Hidup dalam Islam*, terj. Abu Amin dkk, Bogor: Pustaka Thariqul 'Izzah, 2001.
- , *Syakhshiyah Islam*, jilid I, terj. Zakia Ahmad, Lc., Bogor: Pustaka Thariqul 'Izzah, 2003.
- , *Daulah Islam*, terj. Umar Faruq, Jakarta: HTI-Press, 2006
- , *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*, terj. M. Shiddiq al-Jawi, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2006.
- Rahim, Ahmad Thomson dan Muhammad 'Ata' Ur, *Islam Andalusia: Sejarah Kebangkitan dan Keruntuhan*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Sou'yb, Joesoef, *Sejarah Daulat Abbasiah I*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- , *Sejarah Daulat Umayyah II di Cordova*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Suyuthi, Imam, *Tarikh Khulafa'*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Syabab HT, *Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah*, terj. M. Ramdhan Adi, Bogor: Pustaka Thariqul 'Izzah, 2004.
- Syahrastani, Muhammad bin Abdul Karim, *Al-Milal wa al-Nihal: Aliran-aliran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*, terj. Prof. Asywadie Syukur, Lc., Surabaya: Bina Ilmu, t. t.
- Tim Penulis Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syari'at Islam*, Hizbut Tahrir Indonesia, 2002.
- , *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi*, terj. Yahya A.R., Jakarta: HTI-Press, 2008.
- Tohir, Muhammad, *Sejarah Islam dari Andalus sampai Indus*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Drs. M. Maghfur W., Bangil: Al-Izzah, 2002.

Kamus

- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: PP. al-Munawwir Krapyak, 1984.

Booklet

- Tim Hizbut Tahrir, "Mengenal Hizbut Tahrir", *Booklet*, www.hizb-ut-tahrir.org, 2001.

Bulletin

- "Politik bagian dari Islam", *Bulletin Jum'at Al-Islam*, edisi 52.

Majalah

- Muhammad Khair, “Merumuskan Kembali Persatuan Umat Islam” dalam Majalah al-Wa’ie No. 19 Tahun II, 1-31 Maret 2002.
- M. Shiddiq al-Jawi, “Syura Bukan Demokrasi”, dalam Majalah al-Wa’ie No. 36 Tahun III, 1-31 Agustus 2003.
- “Menghentikan Hegemoni Amerika Atas Dunia Islam (Bagian II-Habis)”, dalam Majalah al-Wa’ie No. 37 Tahun IV, 1-30 September 2003.
- M. Shiddiq al-Jawi, “Khilafah”, dalam Majalah al-Wa’ie No. 37 Tahun IV, 1-30 September 2003.
- Syamsuddin Ramadlan al-Nawiy, “Khilafah di Mata Para Ulama”, dalam Majalah al-Wa’ie No. 43 (edisi khusus), Tahun IV, 1-31 Maret 2004.
- M. Shiddiq al-Jawi, “Menepis Opini-opini Negatif Seputar Khilafah”, dalam Majalah al-Wa’ie No. 43 (Edisi Khusus), Tahun IV, 1-31 Maret 2004.
- Hafidz Abdurrahman, MA., ”Antara Thariqah, Uslub, dan Wasilah”, dalam Majalah al-Wa’ie No. 45 Tahun IV, 1-31 Mei 2004.
- Farid Wadjdi, “Mendudukan Sejarah Kekhilafahan Islam”, dalam Majalah al-Wa’ie No. 46 Tahun IV, 1-30 Juni 2004.
- “Khilafah & Khalifah”, dalam Majalah al-Wa’ie No. 54 Tahun V, 1-28 Pebruari 2005.
- “Persaudaraan Islam yang Hakiki”, dalam Majalah al-Wa’ie No. 57 Tahun V, 1-31 Mei 2005.
- “Amîr al-Jihâd”, dalam Majalah al-Wa’ie No. 59 Tahun V, 1-31 Juli 2005.
- “Al-Qadlâ”, dalam Majalah al-Wa’ie No. 60 Tahun V, 1-31 Agustus 2005.
- Yahya Abdurrahman, “Kewajiban Mengangkat Khalifah”, dalam Majalah al-Wa’ie No. 61 Tahun VI, 1-30 September 2005.
- “Walî dan ’Âmil”, dalam Majalah al-Wa’ie No. 61 Tahun VI, 1-30 September 2005.
- “Menyikapi Keragaman Manusia”, dalam Majalah al-Wa’ie No. 62 Tahun VI, 1-31 Oktober 2005.

Yahya Abdurrahman “Keharaman Mengangkat Dua Khalifah”, dalam Majalah *al-Wa’ie* No. 62 Tahun VI, 1-31 Oktober 2005.

“Mashâlih ad-Dawlah”, dalam Majalah *al-Wa’ie* No. 62 Tahun VI, 1-31 Oktober 2005.

Yahya Abdurrahman, “Politik dan Kepemimpinan Islam”, dalam Majalah *al-Wa’ie* No. 63 Tahun VI, 1-30 November 2005.

“Baitul Mal”, dalam Majalah *al-Wa’ie* No. 64 Tahun VI, 1-31 Desember 2005.

“Faktor-faktor yang Memperlemah Daulah Islam”, dalam Majalah *al-Wa’ie* No. 78 Tahun VII, 1-28 Februari 2007.

M. Shiddiq al-Jawi “Kiat Khilafah Mengatasi Konflik”, dalam Majalah *al-Wa’ie* No 84 Tahun VII, 1-31 Agustus 2007.

“Apa itu Khilafah?”, dalam Majalah *al-Wa’ie* No. 86 Tahun VIII, 1-31 Oktober 2007.

“Benarkah Khilafah Tak Ada dalam Nash Syariah”, dalam Majalah *al-Wa’ie* No. 88 Tahun VIII, 1-31 Desember 2007.

Hafidz Abdurrahman, “Mendudukkan Kaidah Ma La Yatimmu al-Wajib...”, dalam Majalah *al-Wa’ie* No. 103 Tahun IX, 1-31 Maret 2009.

Budi Handriyanto “The Falcon of Andalus: ‘Abd ar-Rahman Pendiri Kekhalifahan di Andalusia”, dalam Majalah *Islamia*, Vol. V No. 1, 2009.

Web Site (Internet)

“Hizbut Tahrir Adakan Konferensi Khilafah Internasional”, www.antara.com, diakses pada tanggal 04 Juni 2009.

“Konferensi Khilafah Internasional 2007”, di <http://tv.detik.com>, diakses pada tanggal 04 Juni 2009.

“Konferensi Khilafah Internasional”, www.kabarindonesia.com, diakses pada tanggal 04 Juni 2009.

“Massa HTI Banjiri Jakarta”, www2.kompas.com, diakses pada tanggal 04 Juni 2009.

<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=pembicaraan:diktator>, diakses pada tanggal 06 September 2009.

DAFTAR ISTILAH-ISTILAH PENTING

Afdlaliyah :

Keutamaan

Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi :

Hampir mirip dengan lembaga wakil rakyat/majelis umat.

Ahlul Bait :

Orang-orang (keturunan) yang memiliki hubungan darah (nasab) yang dekat dengan Nabi saw, termasuk Imam Ali dan keturunannya.

Al-Khurramiyah :

Satu dari dua kelompok Syi'ah yang terbentuk dari pengikut Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib (mereka adalah pecahan dari Syi'ah Hasyimiyah). Mereka berkeyakinan bahwa roh dapat berpindah ke jasad yang lain (*tanasukh/reinkarnasi*). Abdullah berpendapat bahwa ruh Tuhan masuk ke dalam tubuhnya (*hulul*), sehingga ia memiliki sifat ketuhanan dan kenabian.

Amîr al-Jihâd :

Panglima Perang

Amîr al- Mukminîn :

Pemimpin orang-orang beriman; salah satu gelar yang maknanya sama *Khalifah* (bisa saling menggantikan).

Aql (akal) :

Daya/kemampuan/kekuatan untuk menilai suatu fakta. Prosesnya yaitu dengan pemindahan (pencerapan) atas fakta yang telah diindera ke dalam otak dibarengi dengan adanya informasi sebelumnya yang akan menafsirkan fakta tersebut, kemudian mengkaitkan antara fakta dengan informasi-informasi yang telah ada di dalam otak.

Aqîdah Aqlîyah :

Pemikiran mendasar dan menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan hidup; serta tentang apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan, di samping hubungannya dengan sebelum dan sesudah alam kehidupan.

Bai'at :

Sumpah (pernyataan) setia dari umat sebagai metode untuk mengangkat seorang khalifah, karena (baiat) merupakan hak umat dalam mengangkat seorang pemimpin. Dengan demikian, baiat merupakan akad penyerahan mandat (kekuasaan) dari umat kepada seorang khalifah.

Baitul Mâl :

Institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikan pos-pos belanja untuk kepentingan seluruh rakyat yang menjadi warga negara dalam negara khilafah.

Bughât :

Pemberontakan.

Dâr al-Islâm :

Suatu wilayah yang menerapkan hukum-hukum Islam dan keamanan wilayah tersebut berada di tangan Islam, yaitu di bawah kekuasaan pertahanan kaum Muslim –baik terhadap ancaman yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri– sekalipun mayoritas penduduknya adalah non-Muslim.

Daulah [Ad-Daulah] :

Negara (istilah baru serapan dari bahasa asing, diperkirakan pada masa Khilafah Abbasiyah ketika terjadi penterjemahan buku-buku filsafat).

Demokrasi :

Pemerintahan (kedaulatan) dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Dengan prinsip utama kedaulatan di tangan rakyat; rakyat sebagai pembuat hukum.

Hukkâm [Al-Hukkâm] :

Para pejabat pemerintahan.

Ijma' :

Kesepakatan (konsensus) atas hukum suatu peristiwa yang merupakan hukum syara'. Adapun ijma' yang dapat dijadikan dalil adalah ijma' yang dijelaskan dengan dalil, yang tidak teriwayatkan, karena orang-orang yang melakukan kesepakatan telah mengetahui dalilnya meskipun tidak mengucapkannya. Orang-orang tersebut adalah mereka yang senantiasa menyertai Rasulullah saw. dan melihat Rasul, yaitu para Sahabat ra.

Ijma' Sahabat :

Kesepakatan (konsensus) para sahabat Nabi saw. atas hukum suatu peristiwa yang merupakan hukum syara'.

Imâm :

Sama dengan *Khalîfah* dan *Amîr al- Mukminîn*.

Imâmah :

Semakna dengan *Khilâfah*.

In'iqâd :

Salah satu jenis bai'at yang menunjukkan keabsahan (legal) seorang khalifah. Bai'at ini tidak harus dilakukan oleh seluruh umat, tapi cukup oleh sekelompok orang (umat) yang menjadi representasi umat.

Infallible :

Sempurna; semakna dengan *Maksum*.

Istinbâth :

Menggali hukum syara' dengan metode ijtihad yang shahih

Jama'ah al-Muslimin :

Kesatuan umat Islam dalam kesatuan wilayah dan kesatuan kekuasaan/kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang imam/khalifah.

Kâffah :

Sempurna; menyeluruh.

Khalîfah :

Gelar kepala negara khilafah. (jama'nya *khalâif* atau *khulafâ'*).

Khilâfah :

Kepemimpinan umum bagi kaum Muslim di seluruh dunia untuk menegakkan syari'at Islam dan mengemban dakwah keseluruh penjuru dunia.

Khulafâur Rasyidîn :

Para khalifah yang mendapat petunjuk (dibimbing oleh al-Quran dan as-Sunnah). Istilah merujuk pada keempat khalifah pasca wafatnya Nabi saw.

Mabda' (Ideologi) :

Pemikiran yang paling mendasar (*aqîdah aqlîyah*) yang melahirkan sistem/peraturan-peraturan (*nidhâm*).

Mahkamah Madhâlim :

Sebuah institusi yang berfungsi untuk mengadili setiap perkara kezaliman antara penguasa dan rakyat.

Majelis Umat :

Suatu lembaga yang berisi wakil-wakil (representasi) umat dan berfungsi untuk menyampaikan aspirasi umat serta melakukan koreksi (*muhâsabah*) terhadap khalifah.

Maksum :

Terbebas/terjaga dari kesalahan; mustahil berbuat salah.

Mu'âwin Tafwîd :

Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan.

Mu'âwin Tanfidz :

Pembantu Khalifah Bidang Administrasi.

Muhâsabah :

Kontrol dan koreksi.

Mulk [Al-Mulk] :

Kerajaan

Mutabannat :

Ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang dipilih dan ditetapkan sebagai pernyataan resmi (diadopsi).

Nidhâm :

Sistem atau peraturan-peraturan.

Qadlâ [Al-Qadlâ] :

Lembaga Peradilan

Qâdlî :

Hakim.

Qâdlî Madhâlim :

Seorang kepala (hakim) dalam mahkamah mazhalim yang menangani perselisihan antara rakyat dengan penguasa.

Sekularisme :

Pemisahan agama dari kehidupan (politik). Agama adalah urusan individu dengan Penciptanya, tidak ada hubungan dengan kehidupan dunia (politik).

Siyâdah [As-Siyâdah] :

Kedaulatan.

Siyâsah [As-Siyâsah] (Politik):

Pemikiran-pemikiran yang terkait dengan pengurusan kepentingan masyarakat; Pemeliharaan urusan rakyat baik dalam negeri maupun luar negeri.

Politik Islam adalah hukum atau pandangan yang berkaitan dengan cara bagaimana mengelola dan mengatur urusan masyarakat dengan hukum Islam.

Syûrâ :

Musyawarah

Tabannî :

Adopsi/legalisasi.

Tharîqah (Metode) :

Aktivitas yang telah ditentukan oleh syara' (bersifat tetap), yang digunakan untuk menunaikan perbuatan yang diperintahkan; hukum-hukum syara' yang menjelaskan tatacara menerapkan akidah dan hukum syara'

Uslûb :

Tatacara untuk mengimplementasikan perintah dan larangan syara', yang aktivitasnya tidak ditentukan oleh syara', tetapi diserahkan kepada ijtihad akal; perbuatan mubah yang bisa ditunaikan sesuai dengan bentuk yang dikehendaki (bersifat tidak tetap), yang notabene dimubahkan oleh pembuat syari'at terhadapnya.

Walî :

Gubernur; pemimpin daerah.

Wasîlah :

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan aktivitas.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Suwanto
Tempat/tgl. Lahir : Sengkemang, 21 Juli 1984
Nama Ayah : Amiruddin
Nama Ibu : Eri
Asal Sekolah : SMU A. Wahid Hasyim, Diwek Jombang Jawa Timur
Alamat Kos : CT 11/76 A Depok Sleman Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Pertamina Pasar Rawang Kao Lubuk Dalam Siak Riau
e-mail : wanyoid_awh@yahoo.com
No. HP : 081 804 244 324

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 019 Jl. Pertamina Lubuk Dalam Siak Riau (1990-1996)
 - b. MTs Hidayatullah, Sialang Baru Lubuk Dalam Riau (1996-1999)
 - c. SMU A. Wahid Hasyim, Diwek Jombang Jawa Timur (1999-2002)
 - d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002-sekarang)
2. Pendidikan Non-Formal
 - Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Jawa Timur (1999-2002)

C. Pengalaman Organisasi

1. Koordinator Departemen Dekorasi dan Dokumentasi, Kompleks “O” al-Amien Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang.
2. Staf Departemen Kesehatan, Organisasi Pelajar Islam Andalas (OPIA), Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang.
3. Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Aktivis Hizbut Tahrir.